

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan era reformasi saat ini, dan dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang direvisi kembali dengan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2005 serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menata daerahnya dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah yang dimiliki, termasuk didalamnya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang berperan sangat penting dalam memajukan perekonomian suatu wilayah kabupaten/kota.

Mencermati keadaan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantaeng sesuai Rencana Strategik (Renstra) yang disusun, dituntut untuk lebih kreatif dalam merencanakan suatu infratraktur yang efisien, efektif, terpadu dan saling sinergi antar berbagai sistem, termasuk perangkat pemerintah, serta peran aktif masyarakat yang lebih nyata, sehingga pembangunan sarana dan prasarana wilayah dapat memberikan manfaat yang nyata dan dampak yang luas dalam pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat (*Local Economic Development*).

B. Manfaat

Manfaat disusunnya rencana strategik adalah :

1. Menjadi acuan dalam pengalokasian sumber dana yang terbatas pada berbagai kegiatan yang sifatnya strategis untuk pencapaian Visi dan Misi Dinas PU dan Kimpraswil.
2. Menjadi acuan seluruh unit kerja Dinas PU dan Kimpraswil dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
3. Menjadi acuan dalam pencapaian kinerja unit-unit keraj Dinas PU dan Kimpraswil, yang kemudian akan berakumulasi menjadi pencapaian kinerja Dinas PU dan Kimpraswil secara keseluruhan.
4. Menjadi acuan Dinas PU dan Kimpraswil dalam mempertanggung jawabkan akuntabilitas kinerjanya.

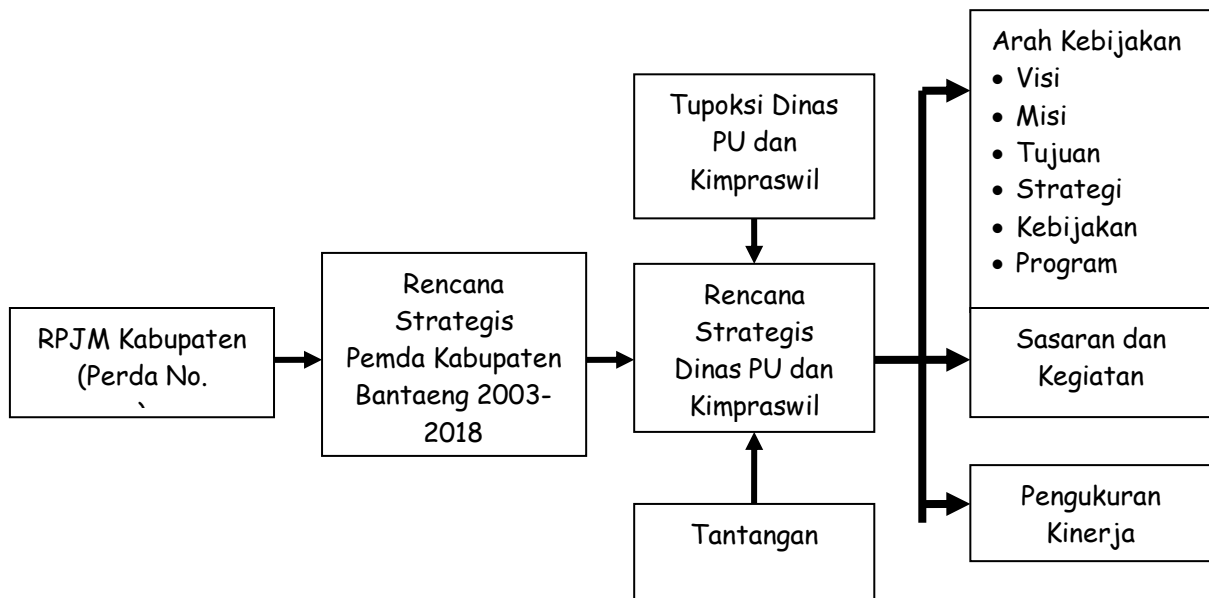
C. Asumsi-Asumsi

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam RencanaStrategik ini adalah : Rencana Strategik Dinas PU dan Kimpraswil dengan mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan pada tingkat Pemerintah Daerh Kabupaten, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng.

Pada bagian ini ditampilkan pembahasan berkaitan dengan konsep umum sebuah proses perencanaan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perencanaan di sini adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pada

suatu periode atau jangka waktu tertentu. Pada **Gambar 1.1.** ditampilkan gambaran urutan kegiatan perumusan perencanaan tersebut mulai dari perumusan visi sampai dengan tersusunnya program atau rencana aksi. Penetapan visi dan tujuan merupakan tahapan yang sangat awal dan sangat penting masih berupa gambaran orientatif.

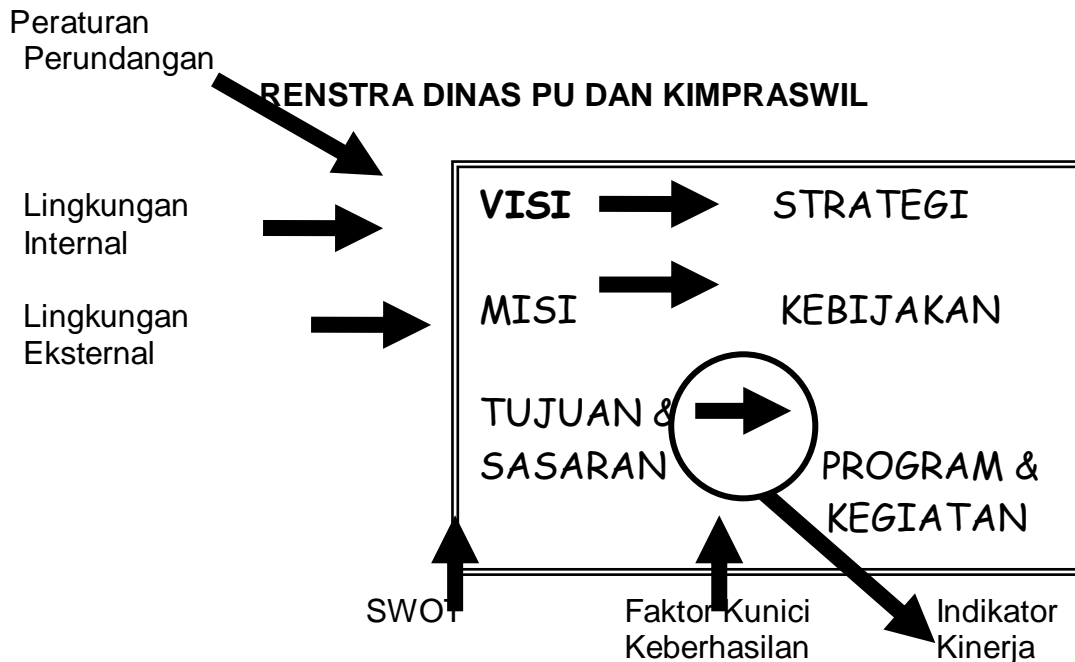
Pada dasarnya rencana strategis, nantinya akan berisi rangkaia kegiatan atau program yang merupakan turunan dari visi, tujuan, strategi dan kebijakan yang telah digariskan oleh Dinas PU dan Kimpraswil untuk suatu jangka waktu tertentu.



Gambar 1.1. Posisi Renstra Dinas PU dan Kimpraswil

1.1. Alur Pikir

Penyusunan Rencana dan Strategi Pembinaan Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prsarana Wilayah Tahun 2013 – 2018 dilandasi oleh Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, factor pengaruh lingkungan internal dan eksternal dalam pengembangan bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah. Secara ringkas pola pikir penyusunan Rencana Strategis Penyelenggaraan pekerjaan umum, permukikaman dan prasarana wilayah ditampilkan pada **Gambar 1.2**



Gambar 1.2. Alur Pikir Penyusunan Rencana dan Strategis Dinas PU dan Kimpraswil

Alur pikir penyusunan Rencana dan Strategi Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng dimulai dengan latar belakang permasalahan yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal Dinas PU dan Kimpraswil saat ini, yang secara signifikan memberikan pengaruh perundangan sebagai landasan penyusunan.

Terlihat pada gambar tersebut bahwa penyusunan rencana strategis tersebut harus diperhatikan beberapa aspek berpengaruh, yang meliputi peraturan perundangan terkait yang berlaku dan pengaruh lingkungan strategis. Pengaruh lingkungan strategis yang dimaksud dapat berupa implikasi dari perubahan atau pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan dapat juga berupa dampak atas diberlakukannya peraturan perundangan.

D. Sistematika

Sistematika Rencana Strategik adalah sebagai berikut :

1. **Pendahuluan**, memuat latar belakang penyusunan Rencana Strategik (Renstra), manfaat, dan asumsi-asumsi yang digunakan, serta sistematika
2. **Tugas Pokok dan fungsi**, memuat perkembangan Dinas PU dan Kimpraswil serta Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU dan Kimpraswil yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng.
3. **Lingkungan internal dan lingkungan eksternal serta factor kunci keberhasilan**, memuat identifikasi kekuatan, dan kelemahan, serta peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas PU dan Kimpraswil, cakupan kerja Dinas PU dan Kimpraswil serta factor-faktor kunci keberhasilan.
4. **Rencana Strategis**, memuat Visi, Misi, Tujuan dan sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang diuraikan menurut sasaran dan Kegiatan. Selain itu juga diidentifikasi indicator kinerja *outputs*, dan *outcomes* pada setiap kegiatan
5. **Penutup**

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PU DAN KIMPRASWIL

Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Kimpraswil

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas , Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang Pekerjaan Umum dan Kimpraswil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan kimpraswil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dan kimpraswil;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil terdiri dari

- A. KEPALA DINAS
- B. SEKRETARIAT
- C. BIDANG BINA MARGA
- D. BIDANG PENGAIRAN
- E. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
- F. BIDANG TATA RUANG
- G. UPTD
- H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, program, pelaporan, kepegawaian, Umum, tatalaksana dan keuangan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan serta ketatalaksanaan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan pedoman, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. Penyajian data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi;

Sekretariat terdiri dari

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor , inventarisasi serta melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan
- (2) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun perencanaan, program dinas, dokumentasi, kepustakaan, penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, serta pelaporan
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

2. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil di Bidang Bina Marga

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang bina marga;
- b. Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga;
- c. Perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
- d. Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- e. Pengumpulan data dan pelaporan bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis
- b. Seksi Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan teknis dan program, pengelolaan serta pemutahiran data dan leger jalan,
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan;

- (3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perijinan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan bencana alam.

3. Bidang Pengairan

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil di bidang Pengairan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas. Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis dan program di bidang Pengairan
- b. Pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang pengairan;
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan, serta pengamanan pengairan;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan pekerjaan umum dan Kimpraswil di bidang pengairan;
- e. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil

Bidang Pengairan terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan
- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
- c. Seksi Bina Manfaat

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai;
- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan, inventarisasi kondisi bangunan pengairan, pengumpulan data, penelitian efisiensi dan efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air, penanggulangan bencana alam serta pengelolaan IPAIR
- (3) Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, pengelolaan hidrologi dan hidrometri, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil / perdesaan, irigasi air tanah, jaringan tersier, administrasi, pengawasan perijinan air permukaan, dan sumber air, rekomendasi perijinan dan pengawasan penambangan bahan galian Golongan C pada alur sungai serta pelatihan dan penyuluhan pengairan.

4. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraawil di bidang Perumahan dan Permukiman

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana teknis di bidang Perumahan dan Permukiman
- b. Pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang Perumahan dan Permukiman
- c. Pengawasan dan pengendalian serta memberi pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pekerjaan di bidang Perumahan dan Permukiman;
- d. Pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan rumah-rumah Dinas;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan di bidang Perumahan dan Permukiman;
- f. Pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam

Bidang Perumahan dan Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Bangunan Gedung dan Rumah Daerah
 - b. Seksi Perumahan dan Permukiman
 - c. Seksi Bina Air Bersih dan Limbah
- (1) Seksi Bangunan Gedung dan Rumah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan teknik pembangunan bangunan gedung Negara dan bangunan umum , renovasi, pemeriksaan keamanan dan keselamatan bangunan gedung pemerintah serta bangunan umum;
 - (2) Seksi Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pelaksanaan pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan massal beserta lingkungannya (drainase dan jalan lingkungan serta pemadam kebakaran)
 - (3) Seksi Bina Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan survey dan investigasi, perencanaan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan limbah.

5. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil di bidang Tata Ruang

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penghimpunan pengolahan, investigasi dan dokumentasi data dan informasi perkembangan Tata Ruang Kota dan Daerah;
- b. Pelaksanaan survey dan pemetaan perkembangan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan pengaturan format, produksi data dan peta dalam rangka perencanaan tata ruang;
- d. Menghimpun, mengoreksi, mengolah, menyimpan, memelihara dan updating data dan peta
- e. Pengawasan dan pengendalian serta memberi pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan perijinan

Bidang Tata Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang
- b. Seksi Perijinan Bangunan
- c. Pengawasan Bangunan

- (1) Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data, informasi perkembangan Tata Ruang Wilayah Kota dan Kecamatan, melaksanakan pemetaan, pengukuran dan pengaturan ketentuan teknis survey dan pemetaan dalam rangka penataan ruang serta perencanaan tata ruang, melakukan pemantauan serta evaluasi perkembangan Tata Ruang Wilayah Kota dan Daerah;
- (2) Seksi Perijinan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan penelitian pendirian Bangunan (IMB), permohonan Ijin Prinsip Tata Ruang yang meliputi petunjuk, tata cara, penelaan serta pengukuran di lapangan
- (3) Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, penertiban bangunan dan penggusuran serta usulan pembongkaran bangunan-bangunan liar.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dibentuk berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan memenuhi kriteria yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB III LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL SERTA FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

A. Lingkungan Internal

Secara kuantitatif, jumlah pegawai sebagai personil yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari di Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng, berjumlah . . . orang, yang tersebar pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas PU dan Kimpraswil. Dilihat dari sisi pendidikan teknik relative lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan non teknik. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA. Tabel di bawah ini menunjukkan persebarannya sebagai berikut :

Tabel 1
Persebaran Pegawai
Menurut Latar Belakang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
a.	Teknik	
1	SLTA	12
2	D III	1
3	S1	21
4	S2	8
5	S3	-
	Jumlah	42
b.	Non Teknik	
1	SD	1
2	SLTP	1
3	SLTA	25
4	DIII	1
5	S1	8
6	S2	-
7	S3	
	Jumlah	36
	Total	78

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, selama 5 tahun terakhir (sejak 2008 – 2013), Dinas PU dan Kimpraswil telah berhasil melakukan berbagai kegiatan dibidang Ketatausahaan, Bina Marga, Pengairan, Perumahan dan Permukiman serta Tata Ruang, Untuk tahun anggaran 2008 – 2012 masih termasuk bidang Kebersihan dan pertamanan nanti pada tahun anggaran 2008 bidang Kebersihan dan pertamanan terpisah dengan Dinas PU dan Kimpraswil dan pada tahun anggaran 2008 bidang Tata Ruang bergabung

dengan Dinas PU dan Kimpraswil. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari alokasi anggaran Dinas PU dan Kimpraswil yaitu :

1. Pada tahun anggaran 2008, total Rp. 70.402.399.551
2. Pada tahun anggaran 2009, total Rp. 65.575.595.877
3. Pada tahun anggaran 2010, total Rp. 53.450.816.250
4. Pada tahun anggaran 2011, total Rp. 69.151.466.168
5. Pada tahun anggaran 2012, total Rp. 40.314.724.250

Dari berbagai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sejak tahun-tahun tersebut antara lain terjadi peningkatan menurut bidang masing-masing, yaitu :

a. Bidang Bina Marga

Dari berbagai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sejak tahun-tahun tersebut antara lain, terjadi peningkatan kapasitas jalan, sehingga arus lalu lintas pada lokasi/wilayah tertentu menjadi lancar, layanan lalu lintas menjadi ekonomis, aksesibilitas/ jarak tempuh menjadi lebih pendek.

Kondisi jalan Kabupaten tahun Kondisi baik, sedang 7 % rusak berat atau kondisi mantap dan tidak mantap. Hal ini selain diakibatkan oleh keterbatasan dana, disiplin pengguna jalan yang tidak mentaati aturan seperti penggunaan kendaraan yang melebihi muatan yang diizinkan, adanya beberapa kejadian bencana yang menyebabkan kerusakan jalan serta masih perlu ditingkatkan kompetensi pelaksana proyek.

b. Bidang Pengairan

Dari berbagai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sejak tahun tersebut antara lain terjadi peningkatan jumlah jaringan irigasi yang dibangun / direhabilitasi dan dipelihara, panjang saluran yang terbangunan, direhabilitasi dan dipelihara, jumlah dan panjang tanggul sungai yang dibangun / direhabilitasi, jumlah dan panjang tanggul pantai yang dibangun / direhabilitasi, jumlah dan panjang pemecah ombak yang dibangun, pemanfaatan sarana irigasi yang telah terbangun dan pembinaan kelompok P3A.

Pada akhir tahun 2008 jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun sebanyak 12 Unit dengan panjang saluran 4.366 m', jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara sebanyak 45 unit yang terdiri rehabilitasi 22 unit dan pemeliharaan 23 unit dengan panjang saluran 12.442 m'.

Sedangkan pada program pengendalian banjir kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai sepanjang 600 M', Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai sepanjang 750 M', Pembangunan prasarana pengaman pantai sepanjang 710 M' dan Pembangunan tanggul pemecah ombak sepanjang 100 M'

Dalam upaya meningkatkan kemampuan aparat penyelenggara pengairan akan disusun Norma, Standar, Prosedur dan Manual Irigasi.

c. Bidang Perumahan dan Permukiman

Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bidang Perumahan dan Permukiman pada tahun 2008 antara lain adalah : Pembangunan saluran drainase sepanjang 3.239 M', Penyediaan sarana dan prasarana air limbah sebanyak 4 Unit, Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan (

jalan lingkungan) sepanjang 9.635 M' dan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan sebanyak 4 Unit.

Dalam upaya peningkatan kemampuan aparat penyelenggara bidang perumahan dan permukiman akan disusun Norma, Standar, Prosedur dan Manual Perumahan dan Permukiman.

d. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang pada tahun 2008 kegiatan yang dapat dilaksanakan antara berupa Revisi Rencana Tata Ruang dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Dinas PU dan Kimpraswil, antara lain :

a. Bidang Bina Marga, yaitu

- 1). Perencanaan teknis belum maksimal, baik dari segi waktu maupun kualitas hasil pelaksanaan;
- 2). Pengawasan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal;
- 3). Sumber daya yang ada belum dapat mengantisipasi semua masalah yang ada.

b. Bidang Pengairan

- 1). Dana perencanaan Jaringan Irigasi tidak memadai sehingga dilaksanakan secara swakelola
- 2). Pengawasan pelaksanaan kurang memadai baik dari segi pendanaan maupun dari segi kemampuan aparat konsultan.
- 3). Sumber daya yang ada belum dapat mengantisipasi semua masalah yang ada

c. Bidang Perumahan dan Permukiman

- 1). Perencanaan teknis belum maksimal, baik dari segi waktu maupun kualitas hasil pelaksanaan;
- 2). Pengawasan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal;
- 3). Sumber daya yang ada belum dapat mengantisipasi semua masalah yang ada.

d. Bidang Tata Ruang

- 1). Sumber daya aparat tidak memadai dalam pelaksanaan pekerjaan,
- 2). Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2008 boleh dikatakan tidak memadai.

Permasalahan lain yang kerap dihadapi dalam penyelenggaraan Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah antara lain menyangkut aspek-aspek manajemen, pengaturan dan pendanaan.

Permasalahan yang terkait masalah dana antara lain :

- Gap yang signifikan antaran jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan kegiatan dibanding dengan kebutuhan nyata di lapangan;
- Keterlambatan terbitnya dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk Dana APBN / BLN

Permasalahan yang terkait masalah manajemen antara lain :

- Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan, baik norma, standar, prosedur dan manual;
- Masih terjadinya inefisiensi pada aspek penyelenggaraan kegiatan

B. LINGKUNGAN EKSTERNAL

Disamping pengaruh internal yang dikemukakan di atas, pengaruh lain yang bersifat eksternal juga cukup signifikan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PU dan Kimpraswil adalah :

a. Bidang Bina Marga :

- “Pertumbuhan” ekonomi yang cukup tinggi dimasa lalu membawa dampak meningkatnya mobilitas bagi masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan lalu lintas
- Masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan belum sepenuhnya memiliki kesadaran yang memadai dalam hal pemanfaatan jalan

b. Bidang Pengairan :

- Curah hujan yang tinggi membawa dampak pada kegiatan yang dilaksanakan;
- Kegiatan pengendalian banjir terhambat karena mobilitas kurang memadai.

d. Bidang Perumahan dan Permukiman

- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih sering mengalami keterlambatan karena terbentur masalah lahan;
-

e. Bidang Tata Ruang

- Alokasi anggaran belum memadai untuk mengantisipasi rencana kegiatan.

Tabel 2
Berbagai Kebijakan yang terkait dengan Dinas PU dan Kimpraswil

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Tentang / Perihal
1.	UU RI No, 38 Tahun 2004	Jalan
2.		Pengairan
3.	UU RI No, 4 Tahun 1992	Perumahan dan Permukiman
4.	UU RI No. 24 Tahun 1992	Penataan Ruang
5.	UU RI No. 24 Tahun 1992	Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.	UU RI No. 18 Tahun 1999	Jasa Konstruksi
7.	UU RI No. 32 Tahun 2004	Pemerintahan Daerah
8.	UU RI No. 33 Tahun 2004	Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah
9.	UU RI No.28 Tahun 1999	Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme
10.	PP RI No. 26 Tahun 1986	Jalan
11.	PP RI No. 27 Tahun 1999	Analisis mengenai Dampak Lingkungan
12.	PP RI No. 25 Tahun 2000	Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
13.	PP RI No. 104 Tahun 2000	Dana Perimbangan
14.	PP RI No. 58 Tahun 2005	Pengelolaan Keuangan Daerah
15.	PP RI No. 8 Tahun 2006	Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi

		Pemerintah
16.	PP RI No. 107 Tahun 2000	Pinjaman Daerah
17.	PP RI No. 41 Tahun	Organisasi Perangkat Daerah
18.	Keppres No. 80 Tahun 2003 Dan Perubahannya	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
19.	Peraturan Menteri PU No.57/PRT/1991	Penyerahan sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tk. I dan Tk. II
20.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1985	Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Keperluan Proyek Pembangunan
21.	Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1990	Pedoman Teknis Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum
22.	Kepmen Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Kepmen 57 Tahun 2007	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
22.	Peraturan Menteri PU No. 339/KPTS/M/2003	Petunjuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah
33.	Peraturan Menteri PU No. 43 Tahun 2007	Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
34.	Kepmen PU No.257/KPTS/ M/2004	Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
35.	Perda Kabupaten Bantaeng No. 24 Tahun 2007	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng
36.	Perda Kabupaten Bantaeng No. 26 Tahun 2007	Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng

Dalam menyikapi kondisi Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng, segala upaya dan sumber daya harus dikerahkan seoptimal mungkin. Analisa SWOT digunakan dalam mengidentifikasi isu-isu strategis. Namun optimalisasi upaya sudah selayaknya disesuaikan dengan kemampuan Internal Dinas PU dan Kimpraswil dalam menghadapi kondisi tersebut.

Secara internal Dinas PU dan Kimpraswil memiliki kekuatan dan kelemahan.

Kekuatan dan kelemahan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan

- a. Memiliki mandate melalui Perda Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng;

2. Kelemahan

- a. Sering terjadinya perubahan struktur organisasi pemerintah

Secara eksternal Dinas PU dan Kimpraswil memiliki Peluang dan Tantangan sebagai berikut :

1. Peluang

- a. Dengan diterbitkannya UU di Bidang Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah

- b. Peraturan perundang-undangan yang memberi peluang lebih besar bagi Dinas PU dan Kimpraswil
 - c. Adanya dukungan dari Bupati.
2. Tantangan
- a. Tekanan yang cukup tinggi dari pihak masyarakat, LSM dan Kelompok-kelompok Politik terhadap Dinas PU dan Kimpraswil untuk lebih memiliki kinerja lebih baik dalam menanggapi permasalahan di bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah.
 - b. Kemampuan aparat belum memadai untuk mengantisipasi semua permasalahan yang ada.

Dalam analisis SWOT di atas, ada empat strategi dasar yang digunakan oleh Dinas PU dan Kimpraswil dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam lingkungannya. Strategi-strategi tersebut meliputi :

1. Strategi memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, terdiri dari :
 - a. Menggunakan teknologi maju dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU dan Kimpraswil;
 - b. Menfasilitasi dan menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah;
2. Strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi tantangan, terdiri dari:
 - a. Proaktif menciptakan hubungan koordinatif dengan Dinas Kimpraswil, Dinas Permukiman, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dinas Lain yang terkait di Provinsi Sulawesi Selatan serta Departemen Pekerjaan Umum R.I.;
 - b. Optimalisasi keberadaan mitra kerja Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng untuk mendapatkan hasil akhir pekerjaan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah;
3. Strategi mengurangi kelemahan untuk mendapatkan peluang, terdiri dari:
 - a. Mengadakan penggalan sumber daya pembiayaan baru bagi pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah;
 - b. Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng.
 - c. Perbaikan dan pemanfaatan manajemen organisasi yang berhubungan dengan Departemen dan Provinsi dalam bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk meminimalkan tantangan, terdiri dari:
 - a. Efisiensi biaya melalui pengurangan aktivitas-aktivitas yang dinilai kurang penting bagi pencapaian misi dan visi organisasi;
 - b. Membangun kemitraan dalam pembangunan bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah.

MATRIKS SWOT

	Kekuatan	Kelemahan
	a. Menggunakan teknologi maju dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU dan Kimpraswil; b. Menfasilitasi dan menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan	a. Mengadakan penggalan sumber daya pembiayaan baru bagi pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah; b. Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng.

Peluang	pembangunan bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah;	c. Perbaikan dan pemanfaatan manajemen organisasi yang berhubungan dengan Departemen dan Provinsi dalam bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah.
Tantangan	<p>a. Proaktif menciptakan hubungan koordinatif dengan Dinas Kimpraswil, Dinas Permukiman, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dinas Lain yang terkait di Provinsi Sulawesi Selatan serta Departemen Pekerjaan Umum R.I.;</p> <p>b. Optimalisasi keberadaan mitra kerja Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng untuk mendapatkan hasil akhir pekerjaan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah;</p>	<p>a. Efisiensi biaya melalui pengurangan aktivitas-aktivitas yang dinilai kurang penting bagi pencapaian misi dan visi organisasi;</p> <p>b. Membangun kemitraan dalam pembangunan bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah.</p>

C. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Keberhasilan Dinas PU dan Kimpraswil ditentukan oleh factor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya aparatur di bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah yang professional.
2. Adanya komitmen pemerintah dan legislative dalam mengalokasikan penyediaan dana yang memadai bagi pemecahan masalah-masalah pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah;
3. Adanya koordinasi yang baik dengan Departemen, Provinsi Sulawesi Selatan dan Instansi terkait di daerah kabupaten.

Budaya organisasi yang dikembangkan dalam kaitan dengan peran yang dijalankan adalah sebagai berikut :

1. **Transparan dalam system manajemen**

Berbagai proses manajemen dilakukan secara transparan, disamping untuk menghindari dari berbagai penyimpangan, keterbukaan akan mendorong manajemen tetap terkendali dan memiliki kinerja yang baik.

2. **Persamaan dan Proporsional**

Berbagai pelayanan yang diberikan kepada stakeholders dilakukan dengan prinsip persamaan dan proporsional.

3. **Komunikasi / Keterbukaan**

Komunikasi dilakukan secara vertikal, horizontal bahkan diagonal pada setiap level. Komunikasi yang lancar pada setiap level akan mendorong terciptanya upaya saling mengendalikan, mengawasi dan mengoreksi,

4. **Profesionalisme**

Seluruh jajaran staf di Dinas PU dan Kimpraswil dituntut untuk profesionalisme, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah dibebankan kepadanya.

5. **Partisipasi**

Seluruh jajaran staf Dinas PU dan Kimpraswil harus berpartisipasi tanpa kecuali sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dibebankan kepadanya untuk ikut memberi kontribusi organisasi secara keseluruhan dalam menjalankan perannya.

6. Fokus kepada pemberian pelayanan

Seluruh jajaran staf Dinas PU dan Kimpraswil harus memberikan focus yang besar terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat.

7. Staf merupakan asset

Seluruh staf di Dinas PU dan Kimpraswil merupakan pelaku utama yang menjalankan tugas pokok dan fungsi. Oleh karena itu, mereka perlu diberikan perhatian pada berbagai aspek yang berkaitan dengan staf.

BAB IV RENCANA STRATEGIK DINAS PU DAN KIMPRASWIL

A. VISI.

Visi Dinas PU dan Kimpraswil:

Meningkatkan sistem penyelenggaraan kegiatan pemerintah Kabupaten Bantaeng Sebagai Wilayah pengembangan industry dan peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah kabupaten Bantaeng sesuai dengan tujuan tercapainya ,tiga pilar yaitu, pembangunan jasa,benih,dan industry.sebagai pusat perkembangan Ekonomi di bagian selatan selata ,Sulawesi selatan.

B. Misi.

Misi Dinas Pu dan Kumpraswil.

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan **pembangunan di Kabupaten Bantaeng.**
2. Menyelenggarakan IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.
3. Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur perkotaan dan perdesaan untuk mendukung peningkatan distribusi Barang dan Jasa, meningkatkan produksi pertanian untuk mengurangi Kawasan Daerah Banjir ,abrasi,dan Kawasan Daerah Genangan Banjir serta kualitas Kesehatan Masyarakat perkotaan dan perdesaan di **Kabupaten Bantaeng,.**
4. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.

C. TUJUAN

1. Meningkatnya Sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan
2. Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi ,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
3. Meningkatnya Sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
4. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman.
5. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dibidang penataan ruang

6. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum

D. SASARAN

Tujuan : 1. Meningkatnya Sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Sasaran :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan.
2. Meningkatnya panjang jaringan jalan nasional dengan spesifikasi jalan bebas hambatan.

Tujuan 2 : Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi ,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Sasaran :

1. Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan rawa melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa.
2.
 1. Meningkatnya infrastruktur prasarana dasar yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan.
 2. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian.
 3. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman pedesaan dan perkotaan.

E, ARAH KEBIJAKAN UMUM

I. Bidang Bina Marga

1. Membuka daerah yang terisolasi;
2. Mempertahankan kondisi jalan yang ada;
3. Meningkatkan kondisi jalan

II. Bidang Pengairan

1. Mempanjang saluran jaringan irigasi;
2. Mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
3. Mempertahankan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun;
4. Menambah panjang dan mempertahankan bangunan pengendalian banjir;
5. Mengurangi dan mencegah terjadinya banjir.

III. Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Menata kawasan kumuh yang ada;

2. Membuka akses jalan desa;
3. Menambah dan memelihara fungsi jaringan air bersih.

IV. Bidang Tata Ruang

1. Menata kawasan yang potensial;
2. Menata peraturan tentang pemanfaatan ruang

F. ARAH KEBIJAKAN OPERASIONAL

I. Bidang Bina Marga

1. Meningkatkan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;

II. Bidang Pengairan

1. Meningkatkan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan jaringan irigasi;
2. Meningkatkan kegiatan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir.

III. Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Mempertahankan kondisi bangunan yang telah dibangun;

IV. Bidang Tata Ruang

1. Memsosialisasikan produk hukum yang dibuat.

BAB V PENUTUP

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas PU dan Kimpraswil dalam rangka menyelenggarakan Sekretariat, Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, Bidang Perumahan dan Permukiman serta Bidang Tata Ruang tahun 2013-2018. Dokumen ini selalu berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas PU dan Kimpraswil juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Dinas PU dan Kimpraswil ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai factor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen Renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas PU dan Kimpraswil ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategik Dinas PU dan Kimpraswil.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

